

376

# MESIR SESUDAH PRESIDEN ANWAR SADAT

Kirdi DIPOYUDO

Presiden Anwar Sadat tewas pada 6 Oktober 1981 sebagai korban usaha pembunuhan yang dilakukan terhadapnya dalam parade militer besar-besaran yang diadakan untuk memperingati perang tahun 1973 yang mengembalikan harga diri kepada bangsa Arab. Pemimpin-pemimpin Mesir bergerak dengan cepat untuk menjamin berlanjutnya pemerintahan. Sesuai dengan konstitusi 1971, Ketua Parlemen Dr. Sufi Abu Talib segera mengambil alih kekuasaan sebagai Pejabat Presiden, dan mengangkat Wakil Presiden Hosni Mubarak sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, sedangkan parlemen hari berikutnya bersidang, memilih Hosni Mubarak sebagai calon presiden tunggal, mengumumkan keadaan darurat untuk 12 bulan dan mengangkat Hosni Mubarak sebagai perdana menteri. Seperti diperkirakan, Hosni Mubarak dipilih sebagai presiden dalam referendum yang diadakan seminggu kemudian dan hari berikutnya ia disumpah sebagai kepala negara yang baru untuk menggantikan Presiden Sadat. Dengan demikian pergantian pemerintah berjalan dengan lancar dan terbunuhnya Presiden Sadat tidak menimbulkan suatu kekacauan.

## TIDAK BANYAK PERUBAHAN

Biarpun terbunuhnya Presiden Sadat itu mengejutkan dan sejauh ini belum ada kepastian mengenai hari depan Mesir di bawah pemerintah yang baru ini, karena berbagai hal dapat diperkirakan bahwa tidak akan terjadi perubahan-perubahan yang besar dalam politik dalam maupun luar negeri Mesir. Pertama, Hosni Mubarak berulang-kali menegaskan, baik sebelum maupun sesudah pelantikannya sebagai presiden bahwa Mesir akan

dilantik ia juga menjelaskan bahwa ia sangat terlibat dalam perumusannya, sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan itu juga merupakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya sendiri. Ketiga, ia dipilih oleh Presiden Sadat sebagai penggantinya karena sama pandangannya. Sejak ditunjuk sebagai Wakil Presiden pada tahun 1975, ia sering diajak Presiden Sadat untuk berjam-jam membicarakan masalah-masalah dalam negeri maupun luar negeri yang dihadapi Mesir dan posisi yang sebaiknya diambil. Sehubungan dengan itu Hosni Mubarak mengutip Sadat sebagai mengatakan: "Siapa tahu, sesuatu bisa terjadi."<sup>1</sup> Rupanya Presiden Sadat menyadari bahwa sewaktu-waktu ia bisa tewas sebagai korban pembunuhan dan menginginkan bahwa bila hal itu terjadi penggantinya telah siap untuk mengambil alih kekuasaan dan meneruskan garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan dan mulai dilaksanakannya. Keempat, politik yang sejauh ini dianut oleh Presiden Sadat, termasuk usaha perdamaannya dengan Israel, bukan saja didukung oleh parlemen, tetapi juga oleh angkatan bersenjata dan mayoritas rakyat. Untuk setiap keputusan penting, ia mencari dukungan rakyat dalam suatu referendum. Referendum serupa itu telah menjadi soal rutin. Konstitusi tahun 1971 misalnya didukung oleh rakyat lewat referendum. Demikianpun perjanjian perdamaian dengan Israel mendapat dukungan lebih dari 95% suara rakyat. Secara demikian kedudukan pemerintah menjadi lebih kuat, biarpun juga menghadapi oposisi unsur-unsur tertentu. Sehubungan dengan itu perlu dicatat, bahwa lawan-lawannya hanya merupakan minoritas kecil, sekalipun mereka itu radikal dan keras suaranya. Akhirnya juga perlu dicatat, bahwa politik yang sejauh ini dianut oleh Pemerintah Sadat telah mendatangkan sejumlah hasil yang dinikmati oleh rakyat. Berkat perjanjian dengan Israel misalnya, Mesir bukan saja mendapatkan kembali Sinai termasuk ladang-ladang minyaknya, rakyat juga tidak lagi khawatir akan kehilangan orang tua, suami, atau ayah dalam peperangan. Terusan Suez juga dapat dibuka kembali dan diperlebar, dan secara demikian menjadi sumber valuta asing, sekitar US\$ 1000 juta pertahun. Demikianpun turisme, perdagangan luar negeri dan investasi asing semakin meningkat. Karena orang-orang Mesir yang bekerja di luar negeri, lebih dari sejuta orang, juga mendatangkan sekitar US\$ 2000 juta per tahun, Mesir mempunyai cukup devisa untuk membiayai impornya.<sup>2</sup> Semuanya itu ikut memperbaiki nasib rakyat banyak dan mengukuhkan dukungannya bagi politik pemerintah. Dengan dukungan parlemen, angkatan bersenjata dan mayoritas rakyat itu, Pemerintah Hosni Mubarak kiranya juga akan dapat melaksanakan maksudnya untuk meneruskan politik Presiden Sadat itu.

<sup>1</sup> Lihat *Kompas*, 9 Oktober 1981.

<sup>2</sup> Lihat antara lain Alan Mackie, "Egypt," dalam *Africa Guide 1981* (Saffron Walden, 1981), hal. 146-147; W.B. Fisher, "Egypt," dalam *The Middle East and North Africa 1980-1981* (London, 1980), hal. 222-223.

## PERKEMBANGAN POLITIK

Dengan demikian untuk mengetahui arah perkembangan Mesir di bawah pemerintah yang baru ini, kita perlu mempelajari garis-garis besar perkembangannya di bawah Presiden Sadat, khususnya setelah ia berhasil memantapkan kedudukannya dalam maupun luar negerinya.

Bulan September 1970 Presiden Nasser meninggal secara mendadak akibat serangan jantung dan sebagai Wakil Presiden Anwar Sadat menggantikannya. Di bawah pemerintah baru ini Mesir mengalami suatu perubahan besar. Setelah berhasil memperkuat kedudukannya pada bulan Mei 1972 dengan mengadakan pembersihan yang kemudian dikenal sebagai Revolusi Koreksi, Presiden Sadat mulai suatu *liberalisasi politik maupun ekonomi*. Suatu konstitusi baru 193 pasal disahkan dalam referendum 11 September 1971. Konstitusi ini sebagian besar berdasarkan konstitusi sementara tahun 1964, tetapi menunjukkan liberalisasi yang lebih besar.

Menurut konstitusi itu Mesir adalah suatu Republik Arab dengan sistem demokrasi dan sosialis, yang didasarkan atas aliansi kaum pekerja dan bersumber pada warisan historis serta semangat Islam. Rakyat Mesir adalah bagian Bangsa Arab yang memperjuangkan persatuan Arab yang lengkap. Islam adalah agama negara, bahasa Arab bahasa resminya dan hukum Islam sumber utama perundang-undangannya, tetapi negara menjamin kebebasan ibadat dan upacara-upacara semua agama. Partai Uni Sosialis Arab adalah organisasi politik negara yang mewakili kekuatan-kekuatan pekerja rakyat: petani, buruh, tentara, cendekiawan dan kapitalisme nasional.

Penguasa tertinggi adalah presiden, yang dipilih untuk masa jabatan 6 tahun, dan ia mengangkat suatu dewan yang terdiri atas perdana menteri, wakil-wakil perdana menteri dan menteri-menteri. Presiden diangkat oleh parlemen dan disahkan dalam suatu referendum. Parlemen terdiri atas 360 orang, 350 orang di antaranya dipilih oleh rakyat dan lainnya diangkat oleh presiden untuk masa jabatan 5 tahun.

Partai tunggal *Uni Sosialis Arab* yang dibentuk oleh Presiden Nasser pada tahun 1961 lambat laun kehilangan peranannya sebagai barometer politik. Sebagai hasil pembicaraan dua tahun mengenai sistem banyak partai, dibentuk *tiga program partai*, yaitu tengah (*Organisasi Sosialis Arab Mesir*), kiri (*Uni Progresif Nasional*), dan kanan (*Liberal-Sosialis*). Ketiganya harus berenerasi dalam raneka Piaang Ilni Sosialis Arab dan hanya boleh berhad

Dalam rangka sistem banyak partai itu *Partai Wafd Baru* muncul bulan Pebruari 1978, tetapi beberapa bulan kemudian terpaksa membubarkan diri berdasarkan hasil referendum. *Wafd Baru* ini adalah satu-satunya partai oposisi dengan dukungan rakyat yang muncul selama Sadat berkuasa. Untuk mencegah gerakan-gerakan semacam itu muncul, Presiden Sadat membentuk partainya sendiri pada musim rontok 1978, yaitu *Partai Demokrat Nasional* (PDN). Dia juga menyingkirkan sisa-sisa kerangka politik Nasser. Mustapha Khalil meletakkan jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal *Uni Sosialis Arab* untuk memimpin *Partai Demokrat Nasional* itu dan menjadi perdana menteri menggantikan Mamdouh Salem.

Sejak itu *Partai Demokrat Nasional* menguasai mayoritas dalam parlemen. Anggota-anggota Partai Sentral yang lama secara massal bergabung dengan PDN, dan *Partai Buruh Sosialis* (PBS), di bawah bekas Menteri Pertanian Ibrahim Shukri, ditunjuk sebagai *partai oposisi resmi*. Dalam pemilihan umum Juni 1979 PDN memenangkan 326 kursi dari 367 kursi, PBS 29 kursi, dan Partai Sosialis Liberal 3 kursi sedangkan *Partai Unionis Progresif* kehilangan semua kursinya.

Akan tetapi sistem baru itu menunjukkan sedikit hasil langsung. Kader yang dibentuk dalam PDN untuk menangani kekurangan-kekurangan barang kebutuhan hidup gagal mengatasi kemacetan suplai. Demikianpun inflasi terus mengganas (sekitar 30% setahun) dan menimbulkan keresahan sosial yang meningkat.

Untuk menghentikan memburuknya situasi dalam negeri itu, pada 15 Mei 1980 Presiden Sadat mengambil alih jabatan perdana menteri dari Mustapha Khalil, mengubah kabinet secara radikal dan menurunkan biaya hidup dengan mengurangi pajak impor dan harga barang-barang sektor pemerintah, lagi pula menaikkan gaji. Untuk memperkuat struktur komando, ia mengangkat 6 wakil perdana menteri, termasuk 4 dengan bidang tanggung jawab khusus. Perubahan-perubahan itu memperkuat kedudukan Wakil Presiden Hosni Mubarak, yang memainkan peranan kunci dalam penunjukan menteri-menteri, menjadi Wakil Ketua PDN (Ketuanya Sadat sendiri), dan memimpin sidang kabinet kalau Presiden Sadat berhalangan.

Presiden Sadat tidak membiarkan oposisi bergerak dengan leluasa dan mendesak unsur-unsur yang tidak dapat dikendalikan ke luar hukum. Tahun 1980, *Jemaat Islamiyah* (perkumpulan-perkumpulan Islam) merupakan ancaman subversif utama bagi pemerintahnya. Kelompok-kelompok informal kaum fundamentalis Islam ini mengambil alih arus utama fundamentalisme Islam dari *Persaudaraan Muslim* dan khususnya kuat di kalangan bangsa

*Koptis* dengan melancarkan kampanye melawan umat Kristen Koptis. Karena mereka ini memberikan perlawanan sengit, maka terjadilah bentrokan-bentrokan berdarah. Sebagai akibatnya, *meningkat ketegangan komunal* yang mengancam kestabilan politik dan persatuan bangsa. Oleh sebab itu pemerintah mengambil *tindakan-tindakan tegas* terhadap mereka.<sup>1</sup>

Nostalgia golongan miskin di kota-kota akan harga-harga mati jaman Nasser juga merupakan suatu ancaman. Oleh sebab itu menjadi lebih penting bahwa Presiden Sadat mampu mempertahankan loyalitas angkatan bersenjata dan bahwa ia mampu menggerakkan ekonomi.

#### ANGKATAN BERSENJATA

Menyusul penghentian US \$ 2000 juta bantuan militer Arab Saudi pada musim panas 1979 sebagai sanksi terhadap perjanjian perdamaian Mesir-Israel, angkatan bersenjata Mesir mengalami keadaan sulit. Pukulan yang pertama ialah pembubaran Organisasi Arab untuk Industrialisasi, yaitu industri senjata gabungan Arab yang dibiayai bersama-sama oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar dan Mesir, dan modalnya bermilyar-milyar dollar Amerika. Sebagai akibatnya proyek-proyek yang besar terpaksa dibatalkan.

Akan tetapi sejak itu Amerika Serikat melancarkan suatu *program suplai senjata besar-besaran*. Suatu paket bantuan US\$ 1500 juta telah digunakan untuk membeli panzer dan 38 pesawat Phantom F-4. Awal 1980 Kongres AS menyetujui suatu paket baru seharga US\$ 3000 juta yang disebar dalam 5 tahun. Tetapi ini hanya merupakan sebagian dari janji AS untuk memperlengkapi Mesir dengan tank M-60 dan pesawat tempur F-16. Semuanya itu bisa mencapai US\$ 8000 juta dan diadakan perundingan-perundingan untuk *membangkitkan kembali industri senjata dengan apa yang tinggal dari Organisasi Arab untuk Industrialisasi tersebut*.

Presiden Sadat memperkuat kedudukannya atas Angkatan Darat dengan memberhentikan Marsekal Abdul-Ghani al Gamassi pada bulan Oktober 1978 dan mengangkat Jenderal Kamal Hasan Ali sebagai penggantinya. Kedudukan AD dalam struktur kekuasaan menjadi lebih kuat dengan pengangkatan Jenderal Ahmed Badawi sebagai Menteri Pertahanan dan Produksi Perang.

<sup>1</sup>Mengenai perkembangan politik Mesir di bawah pemerintahan Presiden Anwar Sadat antara lain lihat R. Michael Burrell dan Abbas R. Kelidar, *Egypt: The Dilemmas of a Nation - 1970-1977* (Beverly Hills - London, 1977), hal. 21-44; Alan Mackie, *loc. cit.*, hal. 142-145; dan Alvin Z.

Secara demikian tiga perwira yang masih aktif duduk dalam kabinet.<sup>1</sup> Hal ini tidak berubah ketika Jenderal Badawi digantikan oleh Jenderal Abu Ghazala.

## PERKEMBANGAN EKONOMI

Terus bertahannya popularitas pemerintah Mesir juga akan bergantung pada kemampuannya untuk memberi makan dan perumahan kepada berjuta-juta penduduk kota dan memenuhi harapan rakyat akan suatu hari depan yang lebih baik.

Dengan 40 juta penduduk, Mesir adalah negara Arab yang paling besar tetapi termasuk yang paling miskin. Lebih dari 90% wilayahnya adalah gurun pasir dan 99% rakyatnya di Delta Nil. Mayoritas hidup dari pertanian. Berkat pembangunan Bendungan Aswan tanah subur Mesir bertambah sepertiga, tetapi *laju pertumbuhan penduduk* adalah lebih tinggi dari pada laju kenaikan produksi pangan, sehingga Mesir terpaksa mengimpor banyak pangan.

Di bawah Pemerintah Nasser, Mesir menganut sistem ekonomi sosialis. Tetapi di bawah Presiden Sadat terjadi suatu perubahan besar. Tanpa meninggalkan sosialisme seluruhnya, ia mulai *menggalakkan investasi* dalam negeri maupun asing. Kebijaksanaan ekonomi Mesir, sejak pintu dibuka pada tahun 1974, adalah betul-betul *bebas*. Pada tahun 1977-1980 kebanyakan pembatasan perdagangan dicabut dan dengan pengembangan pasaran valuta asingnya sendiri, lalu lintas mata uang praktis bebas. Sejauh ini Mesir berhasil mendapatkan valuta asing untuk membiayai impornya. Karena telah menjadi pengekspor minyak, biarpun kecil, ia juga selamat dari akibat-akibat inflasi dunia yang paling buruk. Sebaliknya negara harus bergulat dengan suatu sistem *subsidi bahan-bahan pokok* yang dalam satu dasawarsa meningkat dari 60 juta menjadi 1500 juta pond Mesir per tahun.

Huru-hara yang timbul bulan Januari 1977 sebagai akibat maksud pemerintah untuk mengurangi subsidi pangan sesuai dengan saran IMF mendorong beberapa negara Arab untuk membantu Mesir secara besar-besaran guna mencegah pecahnya suatu revolusi kekerasan. Mereka mengijinkan agar modal *Organisasi Teluk untuk Pembangunan Mesir* sebesar US\$ 2000 digunakan untuk membantu neraca pembayaran Mesir. Tali penyelamat ini bersamaan dengan terjadinya suatu perubahan menyolok dalam *kemampuan Mesir untuk mendapat valuta asing*. Kiriman uang orang-orang Mesir yang bekerja di luar negeri mencapai US\$ 2000 juta setahun. Terusan Suez menghasilkan US\$ 500 juta per tahun. Minyak juga menjadi sumber valuta

asing yang penting. Pada waktu yang sama program Badan AS untuk Pembangunan Internasional (USAID) mulai berjalan dengan lancar.

Pada tahun 1979 minyak menjadi sumber valuta asing yang utama. Tahun 1978 ia menghasilkan US\$ 750 juta, tahun 1979 US\$ 1300 juta dan tahun 1980 US\$ 2500 juta, US\$ 500 juta lebih banyak dari perkiraan. Pendapatan Terusan Suez melonjak dari US \$ 700 juta tahun 1980 menjadi US\$ 1000 juta tahun 1981. Kiriman uang dari luar negeri mencapai puncaknya dengan US \$ 2000 juta setahun, sedangkan turisme mendatangkan US\$ 500 - US\$ 600 juta tahun 1980-1981.

Akan tetapi sebagai akibat keadan valuta asing yang menggembirakan itu, pemerintah *menunda-nunda pembaharuan-pembaharuan ekonomi* yang keras tetapi perlu dalam jangka panjang. Sejak huru-hara tahun 1977 tersebut, pemerintah sangat berhati-hati untuk mengambil tindakan-tindakan yang bisa mengobarkan insiden serupa itu. Pembatasan-pembatasan perdagangan diperlunak, sektor pemerintah dibiarkan menempuh jalannya sendiri dan tunjangan biaya hidup disesuaikan dengan tingkat inflasi. Sebagai akibatnya sebagian besar dari 3½ juta pegawai negeri dan pegawai perusahaan negara, yang tiga perempatnya berpendapatan tidak lebih dari 55 pond Mesir sebulan, terpaksa mengambil suapan atau mencuri waktu untuk dapat hidup. Sistem dua harga untuk komoditi-komoditi pokok seperti semen iu membuka peluang bagi korupsi besar-besaran.

*Kepentingan bisnis tidak pernah setinggi sekarang*, biarpun Mesir terkucil dari negara-negara Arab lainnya. Setelah berhenti pada musim panas 1979 ketika masyarakat bisnis menaksir akibat-akibat sanksi-sanksi KTT Arab Bagdad, *modal investasi mulai mengalir lagi*. Tahun 1979 modal asing swasta yang masuk mencapai US\$ 500 juta; tahun 1980 sekitar US\$ 700 juta. Pada akhir 1979 Badan Inventasi telah menyetujui 1000 proyek di dalam maupun di luar zone-zone bebas, dengan modal sebesar 5.500 juta pond Mesir. Hampir 60% modal itu adalah modal nasional Mesir dan ini mengungkapkan kuatnya basis dalam negeri bagi usaha penanaman modal.

Akan tetapi hanya sebagian kecil proyek-proyek itu sudah beroperasi dan belum ada usaha patungan besar yang mulai. Pada pertengahan 1980 pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan asing untuk mendirikan usaha-usaha patungan dengan perusahaan-perusahaan negara. Biarpun dijumpai banyak masalah, sejumlah usaha patungan serupa itu mulai muncul.

penting lain ialah didirikannya Bank Investasi Nasional untuk mengambil alih dan menangani anggaran investasi.<sup>1</sup>

## PERKEMBANGAN POLITIK LUAR NEGERI

Di bawah Presiden Sadat, juga terjadi suatu *perubahan besar dalam orientasi politik luar negeri Mesir*. Ia menghancurkan hubungan erat Mesir-Uni Soviet yang dijalin oleh Presiden Nasser sejak 1955. Bulan Juli 1972, ia mengusir sekitar 20.000 orang penasihat militer Uni Soviet, antara lain karena Uni Soviet menolak permintaan Mesir akan senjata ofensif guna menghadapi Israel. Sesudah perang 1973, ia mengeluh bahwa Uni Soviet tidak mengirimkan suplai senjata yang dibutuhkannya dan pada tahun 1976, secara sepihak membatalkan Persetujuan Persahabatan dan Kerja Sama Mesir-Uni Soviet tahun 1971. Sebaliknya pada tahun 1974, ia memulihkan hubungan Mesir dengan Amerika Serikat dan mengesahkan suatu undang-undang yang menjamin investasi asing. Presiden Sadat yakin bahwa kepentingan nasional Mesir menuntut agar segera mungkin dicapai perdamaian dengan Israel dan bahwa hal itu hanya bisa dicapai dengan bantuan Amerika Serikat. Berlarut-larutnya permusuhan dengan Israel bukan saja menguras dana dan tenaga Mesir tetapi juga tidak berhasil menyelesaikan sengketa Arab-Israel. Secara demikian Mesir mulai *berorientasi pada negara-negara Barat*, suatu pendekatan yang mendapatkan momentum politik maupun ekonomi yang semakin besar.

Berdasarkan keyakinan tersebut, Presiden Sadat akhirnya mengambil *prakarsa perdamaian yang berani dengan berkunjung ke Israel dan menawarkan perdamaian* dengan syarat-syarat tertentu. Walaupun kebanyakan negara Arab lainnya mengecam prakarsa itu, ia dengan tekun meneruskannya sampai dicapai Persetujuan-persetujuan Camp David untuk mencapai perdamaian dengan Israel dan penyelesaian sengketa Arab-Israel secara menyeluruh. Berdasarkan persetujuan-persetujuan itu akhirnya dicapai *Perjanjian Perdamaian dengan Israel* dan diadakan *perundingan-perundingan mengenai otonomi Palestina* dalam rangka Perdamaian Arab-Israel yang menyeluruh. Sebagai reaksi, negara-negara Arab lainnya mengucilkan Mesir dan mengenakan sanksi-sanksi ekonomi, akan tetapi Presiden Sadat meneruskan usaha perdamaiannya karena yakin bahwa hal itu adalah jalan yang benar dan bahwa negara-negara Arab lainnya akhirnya akan mendukung usaha perdamaian itu.